



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD di Kabupaten Bandung

Salma Talia Eliana Dewi¹, Asro², Muhammad Amin³

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, salmatalia47@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, muhammadasro@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, muhammad.amin@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: salmatalia47@gmail.com

Abstract: *This research employs a legal, empirical approach and descriptive analytical methods. The results indicate that the Legislative School of the National Awakening Party is focused on improving the quality of its members DPRD in Bandung Regency in terms of the review of siyasah dusturiyah. This study examines the mechanism of the PKB legislative school for DPRD members in the gradual cadre formation process which aims to develop the intellectual, physical, moral, and social potential of cadres. The PKB Bandung Regency Branch Leadership Council is to recruit new qualified members. legislative cadres who have competence in the legislative process, political ethics, and public service. In the 2024 Election, PKB won 12 seats in the Bandung Regency DPRD, in the 2024 Legislative Election, PKB recorded 447,466 votes in Bandung Regency. The government and DPRD have a great opportunity to make policies and regional regulations (Perda) that are in line with the goals of the community in accordance with Law No. 32/2004, which provides administrative and political authority to each region. Apart from that, this review of Siyasah Dusturiyah discusses teaching the basic legal and political principles that underlie state management, such as the concepts of al-mas'uliyah (public responsibility), al-'ilah (justice). The PKB Legislative School does not only focus on mastering legislative techniques, but also on improving the morals and ethics of legislative members.*

Keyword: *PKB, Regional regulations, Legislative School, Bandung Regency, Siyasah Dusturiyah.*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan, yuridis, empiris dan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan kualitas anggota dprd di kabupaten bandung terhadap tinjauan siyasah dusturiyah. Penelitian ini mengetahui mekanisme sekolah legislatif pkb anggota DPRD dalam proses kaderisasi bertahap yang bertujuan mengembangkan potensi intelektual, fisik, moral, dan sosial kader. Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Bandung ini untuk merekrut anggota baru yang berkualitas. kader legislatif yang memiliki kompetensi dalam proses legislasi, etika politik, dan pelayanan publik. Pada Pemilu 2024, PKB berhasil meraih 12 kursi di DPRD Kabupaten Bandung, pada Pileg 2024, PKB mencatat perolehan suara sebanyak

447.466 suara di Kabupaten Bandung. Pemerintah maupun DPRD berkesempatan besar untuk membuat kebijakan serta peraturan daerah (Perda) yang selaras dengan tujuan masyarakat sesuai dengan UU No. 32/2004, yang memberikan kewenangan administratif sekaligus politis kepada setiap daerah. Selain itu, tinjauan Siyasah Dusturiyah ini membahas mengajarkan prinsip-prinsip dasar hukum dan politik yang mendasari pengelolaan negara, seperti konsep al-mas'uliyah (tanggung jawab publik), al-'adalah (keadilan), Sekolah Legislatif PKB tidak hanya fokus pada penguasaan teknis legislatif, tetapi juga pada peningkatan moral dan etika anggota legislatif.

Kata Kunci: PKB, Peraturan daerah, Sekolah Legislatif, kabupaten bandung, siyasah dusturiyah.

PENDAHULUAN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menjadikan Pancasila sebagai asas partai, seperti tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar. Namun, tidak dapat dipisahkan dari akar keagamaannya karena didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Pasal 4 menegaskan bahwa prinsip perjuangan PKB berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah, seperti kejujuran, keadilan, persatuan, dan pengabdian kepada Allah. Meskipun terdapat secara resmi antara asas kebangsaan dan prinsip keislaman, Pasal 5 menegaskan bahwa PKB adalah partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka, yang mencerminkan upaya untuk menjembatani nilai keislaman dan kebangsaan. (Yamin, 2018).

Dengan demikian, struktur kepengurusan PKB, yang lahir dari NU (Nahdlatul Ulama), hampir sama dengan organisasi NU sendiri. Berdasarkan Pasal 16, struktur PKB terdiri dari Mustasyar (penasihat partai), Dewan Syura (pembuat kebijakan umum partai), dan Dewan Tanfidz (pelaksana kebijakan strategis partai). Mustasyar memberi nasihat pada Dewan Syura serta Tanfidz, baik diminta maupun tidak. Pada masa reformasi, setelah runtuhnya orde baru sistem politik Indonesia berubah menjadi multi partai Pemerintahan B.J. Habibie membuka ruang demokrasi, sehingga memungkinkan berdirinya banyak partai baru. (Yubis, 2019).

Dari 140 partai yang muncul, hanya 48 partai yang lolos ke Pemilu 1999. dengan dominasi partai Islam seperti PPP, PKS, dan PKB yang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Partai politik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, menggerakkan potensi bangsa, dan berperan aktif dalam politik nasional. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan bagian dari sistem demokrasi, di mana partai-partai berbasis nasional sering menjadi pemenang Pemilu. (Rabanni, 2019).

Calon legislatif (caleg) hasil seleksi partai politik bertujuan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memperkuat posisi partai di Kabupaten Bandung. Strategi PKB difokuskan pada kemenangan Pemilu calon legislatif melalui penguatan kaderisasi, jaringan, dan kerja di tingkat akar rumput seperti kecamatan dan kelurahan. Anggota Legislatif Kabupaten Bandung yaitu Hilman Faruq, menjadi ujung tombak dalam sosialisasi partai ke masyarakat.

Secara nasional, perolehan suara PKB dari Pemilu ke Pemilu menunjukkan fluktuasi, meskipun mengalami fluktuasi jumlah pemilihan statistik menunjukkan bahwa pada 3 gelaran pemilu terakhir di Indonesia PKB mengalami kenaikan jumlah pemilu. Dimulai pada tahun 2014 perolehan suara pemilu adalah 11.298.950, 2019 perolehan suara pemilu adalah 13.570.097 lalu 2024 dapat kenaikan yang lebih tinggi dengan perolehan suara 16.115.655.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Di Indonesia

No	Tahun	Perolehan Suara Pemilu PKB	Growth
1.	1999	13.336.98213	-
2.	2004	12.002.885	-9,96%
3.	2009	5.146.122	-57,02%
4.	2014	11.298.950	119,77%
5.	2019	13.570.097	20,10%
6.	2024	16.115.655	-

Pada tabel 1. kenaikan ini menunjukkan keberhasilan strategi pengutan kader dan kerja politik di tingkat bawah.

Sekolah legislatif merupakan proses kaderisasi bertahap yang bertujuan mengembangkan potensi intelektual, fisik, moral, dan sosial kader. Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Bandung menggunakan model ini untuk merekrut anggota baru yang berkualitas. Kematangan berpolitik kader dapat diukur dari keterampilan kader dalam menjalankan fungsi politik. Semakin tinggi keterampilan, semakin baik praktik politik yang dilakukan. Politik sendiri berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya. (Situmorang, 2012).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta melindungi mereka dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam masyarakat, bangsa, maupun negara tempat mereka hidup, pemegang kekuasaan harus menetapkan hukum, peraturan, serta kebijakan yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, ini dikenal dengan istilah siyasah, yaitu ilmu pemerintahan Islam, yang berfokus pada pengaturan secara spesifik kepentingan masyarakat pada umumnya dan negara pada khususnya. (Baasir, 2017).

Sekolah Legislatif PKB di Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas anggota DPRD menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan mampu mencetak kader yang kompeten, beretika, dan siap menjalankan fungsi legislasi. Dalam tinjauan fiqh siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah, program ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah (*syura*), amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dengan itu Sekolah Legislatif PKB tidak hanya memperkuat kualitas politik, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam dalam praktik ketatanegaraan di tingkat lokal.

Bila ditinjau dari siyasah dusturiyah keberhasilan sekolah legislatif. Pada konsep politik ketatanegaraan dalam Islam yang menekankan pada prinsip keadilan, syura (musyawarah), dan amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks ini, sekolah legislatif menjadi sarana penting dalam mencetak kader legislatif yang tidak hanya memahami proses politik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam.

Sekolah legislatif yang baik membekali kader dengan kemampuan berdiskusi dan mengambil keputusan secara kolektif, sesuai prinsip *syura* yang ditegaskan dalam *Al-Qur'an Surat QS. Asy-Syura* Ayat 38 sebagai berikut : (Gerbaudo, 2019).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Teori Kedaulatan Rakyat

Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan tugas lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat. Jean-Jacques Rousseau menyebut kehendak rakyat yang berdaulat ini sebagai *volonté générale* atau kehendak umum, yaitu kehendak kolektif yang mencerminkan kepentingan bersama Rousseau, *The Social Contract*, 1762. Oleh karena itu, anggota legislatif yang dipilih rakyat bertugas merumuskan dan menyuarakan kehendak umum tersebut dalam bentuk kebijakan publik. (National, 2017).

Sekolah Legislatif DPRD PKB menjadi strategi untuk memperkuat fungsi legislasi daerah melalui pembentukan kader yang berintegritas, responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta mampu menerjemahkan aspirasi rakyat ke dalam kebijakan yang berkeadilan.

Dalam siyasah dusturiyah, konsep musyawarah berdasarkan kepada *Al-Quran dan al-Sunnah*, di antaranya surat *al-Baqarah* ayat 30 :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat Al-Quran tersebut memberikan pelajaran tentang pentingnya menegakkan demokrasi dalam memilih pemimpin sehingga kepemimpinan itu dibangun di atas kebenaran dan suara rakyat, dan Rakyat memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu mengawasi kinerja pemimpinnya, terlebih pada kepemimpinan dalam partai politik.

Teori Pembangunan Politik

Teori Pembangunan Politik memandang masyarakat mampu meningkatkan kehidupan di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, hingga infrastruktur. Sebagian besar menganggap masyarakat sebagai istilah netral yang mencerminkan perubahan sosial dan bisa diterapkan dalam sistem apa pun. Namun, pandangan lain melihat masyarakat sebagai ideologi yang sarat kepentingan politik, dengan makna yang sangat bergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. (Norris, 2017).

Masyarakat nasional memiliki peran strategis dalam politik, terutama dalam menciptakan kesadaran politik, hukum, dan kebangsaan. Pendidikan tinggi menjadi ruang penting untuk kaderisasi pemimpin bangsa, terutama di era globalisasi yang menuntut kompetensi multidisipliner dan integritas moral.

Penegakan moralitas berpolitik yang dibangun oleh Partai Kebangkitan Bangsa memberi hikmah kepada semua anggota legislatif bahwa di atas ilmu ada adab dan moral yang harus tertanam dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah politik Islam yang menyatakan bahwa : *Tashyaruf al-Imam ‘ala ra’iyah manuthun bimaslahah al-ra’iyah*, artinya kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan rakyatnya. Dalam konteks ini pendidikan legislatif berkaitan dengan prinsip *imamah*, *imarah*, dan prinsip manajemen organisasi yang progresif sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. (Beni Ahmad Saebani, 2025)

Demokrasi, menurut Jean-Jacques Rousseau adalah proses bertahap menuju kesejahteraan rakyat, bukan tujuan akhir yang absolut. Hans Kelsen juga menekankan bahwa demokrasi merupakan sistem yang berkembang seiring waktu dan lahir dari gagasan kebebasan yang terstruktur dalam tatanan hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan politik bukan hanya soal perubahan institusi, melainkan juga peningkatan kualitas kesadaran politik rakyat melalui pendidikan yang adil dan inklusif. (Dalton, 2019).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan sumber primer hasil (wawancara dan observasi), metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data penelitian mengenai keberhasilan sekolah khususnya terkait dengan pendidikan politik dan pengembangan sumber daya manusia pada partai politik. Sumber data primernya adalah Undang-Undang No. 31/2002 tentang Partai Politik dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, juga melakukan wawancara dengan pihak PKB tersebut sesuai dengan kompetisinya untuk membicarakan Sekolah legislatif Partai Kebangkitan bangsa pada anggota DPRD di kabupaten Bandung. Adapun data sekunder didapatkan dengan literatur - literatur yang diperoleh dari buku, kitab karya ulama, dan dalam artikel, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. (Rosenbluth & Shapiro, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengindikasikan Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan kualitas anggota dprd di Kabupaten Bandung, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa dalam pileg DPRD di Kabupaten Bandung dari dua periode kebelakang mengalami kenaikan perolehan suara dan mengalami peningkatan pada pileg tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Bandung

No	Tahun	Perolehan Suara PKB	Growth
1.	2014	42.766	-
2.	2019	51.875	21,3%
3.	2024	447.466	761,5%

Program sekolah legislatif bertujuan untuk mencetak kader legislatif yang memiliki kompetensi dalam proses legislasi, etika politik, dan pelayanan publik. Melalui pelatihan intensif, peserta dibekali dengan pengetahuan tentang legislasi, etika politik, dan pelayanan publik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program Sekolah Legislatif dalam meningkatkan kualitas kader legislatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. mengalami kenaikan perolehan suara dan mengalami peningkatan pada pileg tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Bandung

No	Tahun	Perolehan Suara PKB	Growth
1.	2014	42.766	-
2.	2019	51.875	21,3%
3.	2024	447.466	761,5%

Program sekolah legislatif bertujuan untuk mencetak kader legislatif yang memiliki kompetensi dalam proses legislasi, etika politik, dan pelayanan publik. Melalui pelatihan intensif, peserta dibekali dengan pengetahuan tentang legislasi, etika politik, dan pelayanan publik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program Sekolah Legislatif dalam meningkatkan kualitas kader legislatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Bandung Periode 2024 – 2029

No	Nama Lengkap	Dapil (Daerah Pemilihan	Jumlah Suara
1.	Renie Rahayu Fauzi, S.H.	Dapil 5 (Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Ibum)	12.997
2.	Dudi Mustopa	Dapil 5	12.487
3.	Tarya Witarsa, S.Ag.	Dapil 6 (Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah)	12.467
4.	Wawan Sofwan	Dapil 6	12.467
5.	Linda Herlina, S.A.P.	Dapil 4 (Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Rancaekek)	12.467
6.	Acep Ana, S.Ag.	Dapil 4	12.467
7.	Dadang Hemayana, A.Md.	Dapil 7 (Banjaran, Pameungpeuk, Pangalengan, Arjasari, Cimaung)	12.467
8.	Tete Kuswara, S.H.	Dapil 7	12.467
9.	Hilman Farooq	Dapil 3 (Kecamatan Bandung)	12.467
10.	M. Akmal Arafah, S.A.P., M.M.	Dapil 3 (Kecamatan Bandung)	12.467
11.	Krisna Alamsah	Dapil 2 (Kecamatan Bandung)	12.467
12.	Titik Kartika FD, S.Pd.i	Dapil 2 (Kecamatan Bandung)	12.467

Tabel 3 menunjukkan bahwa menurut perolehan kursi DPRD di Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa pada Pemilu Legislatif 2024 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil merebut 12 kursi dari total 55 kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Bandung. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Pemilu 2019, di mana PKB hanya memperoleh 6 kursi. Artinya, PKB berhasil menggandakan representasinya di lembaga legislatif tingkat kabupaten.

Pencapaian ini menempatkan PKB sebagai fraksi terbesar di DPRD Kabupaten Bandung. Ini menjadi bukti nyata dari efektivitas strategi kaderisasi, termasuk melalui Sekolah Legislatif PKB, yang berhasil mencetak (caleg) calon legislatif berkualitas dan berdaya saing.

Dalam Pileg 2024, PKB mencatat perolehan suara sebanyak 447.466 suara di Kabupaten Bandung. Angka ini menempatkan PKB sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak, melampaui partai-partai lain di wilayah tersebut. Sebagai partai dengan perolehan jumlah kursi terbanyak, PKB berhak menempati jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bandung untuk periode 2024–2029.

Pelaksanaan Sekolah legislatif dan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa Anggota DPRD di Kabupaten Bandung

Pelaksanaan Sekolah Legislatif yang diadakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagi anggota DPRD di Kabupaten Bandung bermaksud mengembangkan kompetensi SDM anggota legislatif dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat, Pelatihan legislatif salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD, khususnya dalam bidang legislatif dan pengawasan. Anggota DPRD tidak hanya dituntut untuk membuat peraturan daerah (Perda), tetapi juga untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, mengusulkan kebijakan, dan menanggapi isu-isu publik yang berkembang.

Oleh karena itu, pelatihan ini relevan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota DPRD dalam mengelola proses legislasi dan pengawasan. Hal ini akan tampak pada peningkatan pengetahuan anggota DPRD tentang struktur perundang-undangan dan proses legislasi yang tepat. Ini sangat krusial karena peningkatan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dapat ditingkatkan dengan proses pembuatan perda yang efisien. (Palanza, 2018).

Setiap daerah telah diberikan kewenangan administratif hingga politik melalui UU No. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta UU No. 9/2015 terkait perubahan kedua atas UU No. 32/2004. Kewenangan ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi DPRD maupun Pemda untuk membuat kebijakan maupun perda yang mencerminkan keinginan masyarakat. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah, DPRD bersama pemerintah daerah tentu saja akan membuat peraturan daerah atau perda.

Fungsi utama anggota DPRD pada dasarnya ialah membuat peraturan daerah (perda) Karena lembaga legislatif merupakan lembaga pembuat aturan (legislasi) di daerah, (/Moscatello, 2019). Dengan demikian, tugas utama anggota DPRD ialah membuat perda (fungsi legislasi), yang selaras dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPRD lainnya. Fungsi pengawasan DPRD harus terlebih dahulu membuat peraturan daerah yang menjadi dasar dan acuan pengawasan. Demikian juga, fungsi legislasi mencakup fungsi anggaran. Pasalnya, peraturan daerah dipergunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran. (Tareow,2021).

Dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, sekaligus kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah, maka pimpinan dan anggota DPRD wajib melaksanakan masa persidangan wajib yang berlangsung paling lama enam hari kerja. Selama itu, mereka harus bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing atau melakukan pertemuan tatap muka.

Setiap anggota DPRD Kabupaten Bandung mengimplementasikan masa reses dengan cara yang berbeda dengan menggunakan pendekatan penyerapan aspirasi, yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengkomunikasikan masalah yang mereka alami. Beberapa anggota DPRD melibatkan panitia lokal dalam proses perekrutan peserta reses untuk mempersiapkan semua materi yang diperlukan. Selain itu, ada juga yang bertemu dengan tokoh-tokoh di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan, termasuk kepala daerah, DPD, DPC/PAC, Ketua RT/RW, lurah, dan tokoh masyarakat.

Tahun sidang dibagi menjadi tiga masa persidangan sesuai dengan PP No. 16/2010 mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (7) tentang Masa Persidangan atau Tahun Sidang. Sidang terakhir satu masa keanggotaan DPRD diselenggarakan tanpa masa istirahat, masa sidang terdiri atas masa sidang dan masa istirahat. (Marshall & Wolpe, 2018).

DPRD tentu saja akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi penganggaran, legislasi, dan pengawasan (kontrol), sebagai akibat dari peningkatan kewenangan yang diberikan kepadanya. Di era otonomi ini, ketiga fungsi DPRD tersebut sangat penting untuk dilaksanakan karena akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai seberapa baik anggota dewan yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif daerah dalam menjalankan tugasnya. Menciptakan untuk peraturan daerah

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dinamika perkembangan masyarakat. Anggota DPRD harus mampu bekerja lebih baik.

Fungsi Sekolah Legislatif PKB Untuk Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD Di Kabupaten Bandung

Salah satu program pendidikan politik internal Partai Kebangkitan Bangsa adalah sekolah legislatif. Kader-kader Partai PKB yang duduk di DPRD baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota merupakan sasaran khusus dari sekolah legislatif ini. agar para kader dapat mengabdikan kepada rakyat dengan baik dan tulus. Mereka mendapatkan pendidikan politik yang berkaitan dengan tujuan partai serta tanggung jawab dan wewenang lembaga legislatif.

Beberapa peristiwa tertentu yang berkaitan dengan teori partai politik. Menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan serta peraturan yang tertulis dalam anggaran dasar memuat struktur dan fungsi yang membahas munculnya fungsi-fungsi dari berbagai kepentingan yang mendesak dan membentuk partai politik dalam sistem demokrasi. (Kesier, 2018). Anggota dan masyarakat umum harus mendapatkan pendidikan politik agar menjadi warga negara Indonesia yang memahami hak dan kewajibannya dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Proses di mana masyarakat mewariskan aturan dan cita-cita dari satu generasi ke generasi berikutnya dikenal sebagai sosialisasi politik. (Berenchet, 2018).

Fungsi sosialisasi politik adalah upaya untuk membangun reputasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, partai politik memiliki nilai yang lebih tinggi jika mereka mampu memenuhi tugas lain, yaitu mendidik anggotanya untuk menjadi manusia yang memahami tugas-tugas kewarganegaraan mereka dan memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Fungsi ini terkait erat dengan masalah pemilihan pemimpin, baik internal maupun nasional, sebagai cara untuk menarik kandidat politik. (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Setiap partai membutuhkan kader yang berkualitas untuk kepentingan internalnya. Keberhasilan kader partai berkualitas dapat menjadikan partai yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Partai politik akan dapat memilih pemimpin mereka sendiri dan mengajukan kandidat untuk bersaing memperebutkan posisi kepemimpinan nasional apabila mereka memiliki kader-kader yang kuat.

Partai politik juga tertarik untuk mengembangkan atau menambah jumlah anggota di samping tingkat-tingkat tersebut. Mereka berusaha menarik sebanyak mungkin orang untuk bergabung. Kemungkinan untuk berpartisipasi ditingkatkan dengan pembentukan organisasi massa yang melibatkan kelompok-kelompok buruh, petani, pemuda, pelajar, wanita, dan sebagainya.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD Di Kabupaten Bandung

Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan kualitas anggota DPRD di Kabupaten Bandung membahas tentang legislasi negara dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah. Konsep konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah munculnya legislasi di suatu negara), legislasi, lembaga demokrasi, dan *syura* semua pilar penting dalam legislasi tercakup dalam bagian ini di antara topik-topik lainnya. Mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia merupakan tujuan dari legislasi. (Ziblatt, 2017).

Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bandung memiliki fungsi penting dalam membentuk anggota DPRD yang berkualitas. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelatihan ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar hukum dan politik yang mendasari pengelolaan negara, seperti konsep *al-mas'uliyah* (tanggung jawab publik), *al-'adalah* (keadilan), Sekolah Legislatif PKB tidak hanya fokus pada penguasaan teknis legislatif, tetapi juga pada peningkatan moral dan etika anggota legislatif agar mereka dapat menghindari praktik buruk seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pelatihan ini mengajarkan anggota DPRD untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, dengan memberikan keterampilan komunikasi yang efektif. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan:

Surat Al-Isra' · Ayat 36 :

وَلَنْ نَقُفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لَأُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.”

Surat An-Nahl · Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِتْقَانِ وَالْإِتْقَانِ ذِي الْقُرْبَى وَيُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Dalam hal ini, pendidikan yang diberikan sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah, yang mengutamakan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam pembuatan kebijakan. Pendidikan yang berbasis pada prinsip *al-'adalah* membantu anggota DPRD untuk membuat keputusan yang adil dan berpihak pada kepentingan umum, sementara prinsip *al-shafafiyah* menjadikan transparansi sebagai landasan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya pelatihan ini, anggota DPRD diharapkan dapat menjalankan tugas legislatif mereka dengan penuh tanggung jawab, baik dalam hal pengawasan, penyusunan peraturan daerah, maupun penganggaran berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Levitsky & Ziblatt, 2020).

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan Sekolah Legislatif PKB, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya sumber daya, dan kebutuhan untuk memperluas partisipasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Sekolah legislatif PKB perlu ditingkatkan, pelatihan ini sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Sehingga untuk mencetak anggota legislatif yang lebih berkualitas serta memberikan manfaat yang lebih luas (Eatwill & , 2018).

وَلَا قَالَ رَبُّكَ لِمَ لَمْ يَجْعَلْ فِي الرِّسَالَةِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا لَا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat Al-Quran tersebut memberikan pelajaran tentang pentingnya menegakkan demokrasi dalam memilih pemimpin sehingga kepemimpinan itu dibangun di atas kebenaran dan suara rakyat, dan Rakyat memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu mengawasi kinerja pemimpinnya, terlebih pada kepemimpinan dalam partai politik.

KESIMPULAN

1. Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Bandung sangat penting untuk menciptakan kader-kader legislatif yang tidak hanya mumpuni secara teknis, tetapi juga berintegritas tinggi. Sekolah ini menjadi wadah strategis dalam proses kaderisasi yang sistematis, terstruktur, dan terarah. Melalui program ini, para calon anggota legislatif dibekali pemahaman tentang proses legislasi, etika politik, dan pelayanan publik. Hal ini menjadikan kader PKB memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyusun dan mengawal kebijakan daerah. Dalam Pemilu 2024, PKB membuktikan keberhasilan ini dengan meraih 12 kursi di DPRD Kabupaten Bandung. Jumlah suara sebesar 447.466 mencerminkan kepercayaan publik terhadap kualitas kader yang diusung. Peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB sangat vital dalam memfasilitasi proses ini secara menyeluruh. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, para anggota legislatif mampu menghadapi tantangan politik lokal dengan lebih adaptif. Keberadaan sekolah ini

- menunjukkan bahwa pendidikan politik internal partai memiliki dampak signifikan terhadap performa elektoral. Maka, Sekolah Legislatif PKB layak dijadikan model pembelajaran bagi partai lain dalam meningkatkan kualitas kaderisasi.
2. Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan program pendidikan politik internal yang bertujuan meningkatkan kualitas kader legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Program ini fokus pada penguatan kompetensi anggota DPRD dalam proses legislasi yang tepat. Keberhasilan program ini tercermin dari peningkatan signifikan perolehan suara PKB dalam pemilu 2024 di Kabupaten Bandung, yang mencapai 447.466 suara, menjadikannya partai dengan perolehan suara terbanyak dan berhasil meraih 12 kursi DPRD dari total 55 kursi yang tersedia. Pencapaian ini menempatkan PKB sebagai fraksi terbesar di DPRD Kabupaten Bandung, menggantikan dominasi Partai Golkar yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
 3. Dari perspektif siyasah dusturiyah, keberhasilan Sekolah Legislatif PKB di Kabupaten Bandung menunjukkan relevansi antara prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola politik. *al-mas'uliyah* (tanggung jawab publik) dan *al-'adalah* (keadilan) menjadi landasan utama dalam proses pembentukan karakter kader. Sekolah legislatif ini tidak hanya mengajarkan aspek teknis kelembagaan, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan etika berpolitik. Hal ini penting karena anggota DPRD merupakan representasi suara rakyat yang harus menjunjung tinggi amanah. Dengan itu, kader tidak hanya dituntut kompeten secara administratif, tetapi juga mampu menjaga integritas sebagai pelayan publik. Siyasah dusturiyah memberikan kerangka normatif bagi partai politik untuk tidak terjebak pada pragmatisme politik semata. PKB berhasil memadukan pendidikan politik dengan nilai-nilai keislaman yang substantif. Sekolah legislatif ini menjadi ruang aktualisasi nilai syariah dalam sistem demokrasi Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa partai berbasis Islam mampu bersinergi dengan sistem demokrasi yang ada. Maka, tinjauan siyasah dusturiyah memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap program kaderisasi politik seperti yang dilakukan PKB.

REFERENSI

- Baasir, F. (n.d.). *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*. Jakarta: Grafindo Persada.
- SimpusJournal IAIS Amba
- Berenschot, W. (2018). *Incumbent Bureaucrats: Why Elections Undermine Civil Service Reform in Indonesia*. *Public Administration and Development*, 38(4), 135-143.
- Dalton, R. J. (2019). *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies* (7th ed.). CQ Press.
- Eatwell, R., & Goodwin, M. (2018). *National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy*. Pelican Books.
- Gerbaudo, P. (2019). *The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy*. Pluto Press.
- Keiser, K. (2018). *Getting Elected is the Easy Part: Working and Winning in the State Legislature*. Washington State University Press.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2020). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing Group.
- Lubis, A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Marshall, B. W., & Wolpe, B. C. (2018). *The Committee: A Study of Policy, Power, Politics and Obama's Historic Legislative Agenda on Capitol Hill*. University of Michigan Press.
- Mas Rabbani Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. repository.iainponorogo.ac.id

- Moscato, C. (2019). *See Jane Win: The Inspiring Story of the Woman Changing American Politics*. Dutton Books.
- National Democratic Institute. (2017). *Political Party Training Manual*. National Democratic Institute.
- Norris, P. (2017). *Strengthening Electoral Integrity: The Pragmatic Case for Assistance*. Cambridge University Press.
- Palanza, V. (2018). *Checking Presidential Power: Executive Decrees and the Legislative Process in New Democracies*. Cambridge University Press.
- Rosenbluth, F., & Shapiro, I. (2018). *Responsible Parties: Saving Democracy from Itself*. Yale University Press.
- Saebani, Beni Ahmad, (2024). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Saebani, Beni Ahmad, (2025). *From Outsider to Engagement: The Transformation of a Puritanical Islamic Organization through Government-Led Religious Moderation Initiatives*. [Vol 15 No 1: Spring 2025](https://journals.umsida.ac.id/index.php/JITC/index) , <https://journals.umsida.ac.id/index.php/JITC/index>
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia. Inlis Lite
- Tarrow, S. (2021). *Movements and Parties: Critical Connections in American Political Development*. Cambridge University Press.
- Yamin, H. M. (2018). *Perspektif Demokrasi untuk Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Kubuku
- Ziblatt, D. (2017). *Conservative Parties and the Birth of Democracy*. Cambridge University Press.